# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

23/9 21
Nanela

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

# DAFTAR ISI


BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 2

1.4 Sistematika Penulisan ..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 4

2.1 Tujuan Evaluasi Renja ..... 4

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II ..... 4

BAB III RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH ..... 9

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 ..... 9

BAB IV PENUTUP ..... 13

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan top down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Langkat merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja tahun 2021 BPKAD Kabupaten Langkat adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Langkat.

**1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 5 (lima) Bupati Kabupaten Langkat.

**2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Langkat adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. TUJUAN EVALUASI
- 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN 2021

## 2.1. Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan dilakukannya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 antara lain untuk :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalah dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ini, hasil Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk BPKAD adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran | Kode Rekening | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun ke-n) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (5) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (5) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 = 9+10 | | 12 = 11/8 x 100 | | 13 =7+11 | | 14 = 13/6 x 100 | | 15 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah | 5 02 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | 5 | 8.318.038.278 | 1 | 5.449.576.461,00 | 1 Tahun | 6.469.068.000 | 0,25 | 767.368.477 | 0,75 | 2.089.159.821 | 0,50 | 2.856.528.293 | 50,00 | 44 | 0,5 | 8.306.054.754 | | 99,86 | |
| | | 5 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, dan materai atas terbitnya Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Bendahara serta Pengurus Barang SKPD se-Kab. Langkat TA. 2022 | 60 | 1.330.747.305 | 12 | 548.336.755,00 | 12 Bulan | 549.679.625 | 2 | 99.650.000 | 1 | 31.030.000 | 3 | 80.680.000 | 75,00 | 15 | 3 | 621.016.755 | | 46,67 | |
| | | 5 02 01 2.02 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Tim Counter Part Pemkab. Langkat, buku laporan keuangan lima tahunan | 100% | 1.264.335.820 | 100% | 608.080.470,00 | 100% | 571.088.036 | | - | 30 | 175.991.045 | 30 | 175.991.045 | 30,00 | 22 | 30 | 784.077.515 | | 58,06 | |
| | | 5 02 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Bulanan Seluruh SKPD | 60 | 353.875.100 | 100% | 130.126.085,00 | 12 Bulan | 120.000.000 | | - | 3 | 24.300.000 | 3 | 24.300.000 | 25,00 | 20 | 3 | 154.426.085 | | 43,64 | |
| | | 5 02 01 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.05 07 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai BPKAD Kab. Langkat, Tersedianya pakaian hari-hari tertentu guna keseragaman | 86 | 250.691.987 | 88 | 122.650.000,00 | 93 Stel | 126.280.000 | | - | | - | 0 | - | - | | 0 | 122.650.000 | | 48,92 | |
| | | 5 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bimtek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah | 5 | 628.098.900 | 1 | 266.713.853,00 | 1 Tahun | 625.065.000 | | - | | - | 0 | - | - | | 0 | 266.713.853 | | 42,46 | |
| | | 5 02 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 10 | 282.588.029 | | - | 1 Kegiatan | 233.294.312 | | - | | - | 0 | - | - | | 0 | - | | 0,00 | |
| | | 5 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan | 5 | 359.786.001 | 1 | 55.062.000,00 | 2 Kegiatan | 1.092.182.537 | | - | 1 | 460.611.725 | 1 | 460.611.725 | 50,00 | 42 | 1 | 515.673.725 | | 143,33 | |
| | | 5 02 01 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan peralatan elektronika serta listrik BPKAD | 5 | 45.553.678 | 0,7 | 10.027.000,00 | 1 Tahun | 9.471.335 | | - | | - | 0 | - | - | | 0 | 10.027.000 | | 22,01 | |
| | | 5 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | 5 | 195.288.840 | 1 | 136.114.600,00 | 1 Tahun | 130.524.516 | | - | 0,75 | 34.637.500 | 0,3 | 34.637.500 | 75,00 | 27 | 0,3 | 170.752.100 | | 87,44 | |
| | | 5 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor BPKAD | 5 | 79.689.107 | 1 | 53.979.650,00 | 1 Tahun | 44.064.398 | | - | 0,5 | 21.829.000 | 0,5 | 21.829.000 | 50,00 | 50 | 0,5 | 75.808.650 | | 95,13 | |

| No | Sasaran | Kode Rekening | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun berjalan devaluasi) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%) | | Ket Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 = 9+10 | | 12 = 11/8 x 100 | | 13 = 2+11 | | 14 = 13/6 x 100 | | 15 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksanaya penyediaan makanan dan minuman | 60 | 48.315.300 | 12 | 33.000.000,00 | 1 Tahun | 36.300.000 | | - | | - | 0 | - | | - | 0 | 33.000.000 | | 68,30 | |
| | | 5 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksanaya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor BPKAD | 5 | 134.329.004 | 1 | 120.399.600,00 | 1 Tahun | 113.119.500 | | - | 0,5 | 8.000.400 | 0,5 | 8.000.400 | 50,00 | 7 | 0,5 | 128.400.000 | | 95,59 | |
| | | 5 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksanaya pembelian surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan | 5 | 49.925.810 | 0 | - | 1 Tahun | 127.519.803 | | - | | - | 0 | - | | - | 0 | - | | 0,00 | |
| | | 5 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksanaya perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan koordinasi, konsultasi dan studi banding | 5 | 1.469.459.000 | 1 | 1.050.888.196,00 | 1 Tahun | 1.154.050.000 | 0,25 | 111.691.525 | 0,25 | 185.712.525 | 0,5 | 297.404.050 | 50,00 | 25 | 0,5 | 1.398.292.346 | | 89,57 | |
| | | **5 02 01 2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksanaya pengadaan kendaraan dinas/operasional | 10 | 73.689.000 | 1 | 864.999.900,00 | 1 Unit | 31.851.000 | | | | - | 0 | - | | - | 0 | 864.999.900 | | 1173,85 | |
| | | 5 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan meja kerja, kursi, lemari dan filing kabinet | 20 | 41.873.360 | 15 | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksanaya pengadaan peralatan gedung kantor | 36 | 399.809.108 | 24 | 218.075.000,00 | 5 Kegiatan | 115.553.448 | | | | - | 0 | - | | - | 0 | 218.075.000 | | 54,53 | |
| | | 5 02 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksanaya pengadaan perlengkapan kantor | 4 | 43.038.164 | 15 | 47.494.000,00 | 1 Unit | 160.000.000 | | | | - | 0 | - | | - | 0 | 47.494.000 | | 10,77 | |
| | | **5 02 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksanaya pembayaran tagihan Listrik, air, telepon dan internet | 60 | 899.759.777 | 100 | 175.163.366,00 | 12 Bulan | 305.940.000 | 3 | 29.379.787 | 3 | 45.607.082 | 6 | 74.921.849 | 50,00 | 24 | 6 | 250.085.115 | | 27,79 | |
| | | 5 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksanaya pembayaran pegawai honorer/tidak tetap | 60 | 542.750.000 | 100 | 195.250.000,00 | 13 Bulan | 493.147.600 | 7 | 60.000.000 | 4 | 91.500.000 | 6 | 151.500.000 | 46,15 | 31 | 6 | 546.750.000 | | 100,74 | |
| | | **5 02 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksanaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Terlaksanaya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional | 5 | 786.000.140 | 100 | 264.103.844,50 | 1 Tahun | 476.280.000 | 0,25 | 9.264.056 | 0,25 | 20.172.419 | 0,5 | 29.936.475 | 50,00 | 6 | 0,5 | 294.040.320 | | 37,41 | |
| | | 5 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksanaya pemeliharaan peralatan kantor BPKAD | 60 | 158.846.800 | 100 | 18.250.000,00 | 100% | 61.485.650 | | - | 25 | 3.600.000 | 25 | 3.600.000 | 25,00 | 4 | 25 | 31.850.000 | | 16,96 | |
| | | 5 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksanaya jaminan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab. Langkat, Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor BPKAD | 5 | 515.923.203 | 1 | 479.809.354,45 | 1 Tahun | 550.000.000 | | - | | - | 0 | | | - | 0 | 479.809.354 | | 93,00 | |
| | | **5 02 02** | **Program Pengelolaan Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **5 02 02 2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 02 02 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD TA. 2022 Kab. Langkat | 5 | 568.095.196 | 1 | 357.041.085,00 | 1 Kegiatan | 270.681.874 | | - | | - | 0 | - | | - | 0 | 357.041.085 | | 62,85 | |
| | | 5 02 02 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Tersusunnya KUA dan PPAS P.APBD TA. 2021 Kab. Langkat | 5 | 453.215.533 | 1 | 336.467.137,50 | 1 Kegiatan | 258.945.713 | | | 0,25 | 10.950.000 | 0,3 | 10.950.000 | 25,00 | 5 | 0,3 | 347.417.133 | | 76,74 | |
| | | 5 02 02 2.01 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD | Terlaksanaya verifikasi RKA SKPD Kab. Langkat | 5 | 349.306.760 | 1 | 133.218.065,00 | 1 Kegiatan | 185.813.496 | | | | - | 0 | | | - | 0 | 133.218.065 | | 38,14 | |
| | | 5 02 02 2.01 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD | Terlaksanaya verifikasi Perubahan RKA Kab. Langkat | 5 | 349.306.760 | 1 | 133.218.065,00 | 1 Kegiatan | 630.539.826 | | | 0,25 | 182.405.509 | 0,3 | 182.405.509 | 25,00 | 29 | 0,3 | 315.623.574 | | 90,36 | |
| | | 5 02 02 2.01 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD | Terlaksanaya verifikasi DPA SKPD Kab. Langkat | 5 | 568.095.196 | 1 | 357.041.085,00 | 1 Kegiatan | 277.775.497 | | | 0,25 | 146.294.390 | 0,3 | 146.294.390 | 25,00 | 53 | 0,3 | 503.335.475 | | 88,61 | |

| No. | Sasaran | Kode Rekening | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun ke n yang dievaluasi | | Capaian Kinerja Hasil Evaluasi | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 = 9+10 | | 12 = 11/8 x 100 | | 13 = 7+11 | | 14 = 13/8 x 100% | | 15 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Terlaksananya verifikasi Perubahan DPA Kab. Langkat | 5 | 452.715.333 | 1 | 336.462.132,50 | 1 Kegiatan | 635.785.589 | | - | 0,25 | 196.054.298 | 0,3 | 196.054.298 | 25,00 | 31 | 0,3 | 532.516.431 | | 117,63 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Tersusunnya Perda APBD Kab. Langkat dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat TA. 2022 | 5 | 765.476.247 | 1 | 406.613.707,00 | 2 Kegiatan | 1.433.461.346 | | - | 0,25 | 242.528.289 | 0,3 | 242.528.289 | 12,50 | 17 | 0,3 | 649.141.996 | | 244,52 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersusunnya Perda P.APBD Kab. Langkat, tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD Kab. Langkat | 5 | 184.602.404 | 1 | 235.757.590,00 | 2 Kegiatan | 560.612.471 | | | | | 0 | | | | 0 | 235.757.590 | | 127,71 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Terlaksananya laporan rekonsilisasi kas daerah | 5 | 270.194.250 | 1 | 205.866.824,00 | 1 Tahun | 97.070.370 | | - | 0,25 | 18.985.015 | 0,3 | 18.985.015 | 25,00 | 20 | 0,3 | 224.851.839 | | 83,22 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Terlaksananya penerbitan dan pendistribusian SPD | 0 | - | | | 1 Tahun | 49.398.889 | | - | | - | 0 | - | - | | 0 | - | | #DIV/0! | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis | 5 | 570.979.688 | 1 | 117.858.108,00 | 1 Tahun | 249.736.809 | 0,25 | 15.927.200 | 0,25 | 48.950.395 | 0,5 | 64.877.595 | 50,00 | 26 | 0,5 | 182.735.703 | | 32,00 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta dan tersedianya laporan berita acara rekonsilisasi pajak dengan KPP dan KPPN | 0 | - | | | 1 Tahun | 257.001.108 | | - | 0,25 | 12.580.000 | 0,3 | 12.580.000 | 25,00 | 5 | 0,3 | 12.580.000 | | #DIV/0! | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan | Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD | 5 | 307.877.500 | 1 | 228.798.745,00 | 1 Tahun | 239.939.456 | | - | 0,25 | 28.282.032 | 0,3 | 28.282.032 | 25,00 | 12 | 0,3 | 257.080.777 | | 83,50 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya FGD bendahara Pengeluaran se kab langkat dan DAK Fisik, Dana desa dan dana kelurahan | 5 | 276.269.390 | 1 | 142.744.724,00 | 1 Tahun | 573.378.415 | | - | 0,25 | 378.035.000 | 0,3 | 378.035.000 | 25,00 | 22 | 0,3 | 520.779.724 | | 188,50 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 10 | 791.829.671 | 100 | 440.833.900,00 | 100% | 597.497.871 | | - | | - | 0 | - | | - | 0 | 440.833.900 | | 55,67 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah | 10 | 659.216.659 | 100 | 141.304.850,00 | 100% | 152.768.694 | | - | | - | 0 | - | | - | 0 | 141.304.850 | | 71,44 | |

4

| No | Sasaran | Kode Rekening | | | | | Program / Kegiatan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun ke-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan* | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 = (9+10) | | 12 = (11/8 x 100 | | 13 =(7+11) | | 14 = (13/6 x 100% | | 15 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten | 5 | 570.979.688 | 100 | 117.858.108,00 | 1 Tahun | 141.315.182 | | - | | - | 0 | - | - | - | 0 | 117.858.108 | | 20,64 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 07 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | 240 | 409.490.873.011 | | | 1 Tahun | 338.422.209.100 | | - | 0,25 | 75.097.426.060 | 0,3 | 75.097.426.060 | 75,00 | 22 | 0,3 | 75.097.426.060 | | 18,34 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Dana yang Disalurkan | 3 | 10.041.615.453 | | | 1 Tahun | 8.298.855.746 | | - | 0,25 | 323.340.000 | 0,3 | 323.340.000 | 75,00 | 4 | 0,3 | 323.340.000 | | 3,22 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Dana Bagi Hasil yang Disalurkan | 240 | 5.572.144.301 | | | 1 Tahun | 4.605.077.935 | | - | | - | 0 | - | - | - | 0 | - | | 0,00 | |
| | | 5 | 02 | 03 | | | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Tersusunnya dokumen standar satuan harga | 3 | - | 0 | - | 1 Dokumen | 227.037.014 | | - | | - | 0 | - | - | - | 0 | - | | #DIV/0! | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pengamanan asset Pemda dan terlaksanaya pembuatan sertifikat tanah milik Pemda, pelelangan dan penghapusan BMD | 5 | 335.474.750 | 1 | 221.556.140,00 | 1 Tahun | 305.449.178 | | - | 0,25 | 22.950.000 | 0,3 | 22.950.000 | 75,00 | 8 | 0,3 | 244.506.140 | | 72,88 | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemutakhiran data asset dan sensus BMD | 5 | 106.716.800 | 1 | 7.360.000,00 | 1 tahun | 78.855.570 | | | 0,25 | 22.950.000 | 0,3 | 22.950.000 | 75,00 | 29 | 0,3 | 30.310.000 | | 28,40 | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Terlaksananya penyusunan laporan BMD | 5 | 264.593.241 | 1 | 247.984.193,00 | 1 tahun | 246.377.420 | 0,25 | 3.000.000 | 0,75 | 81.367.420 | 0,5 | 84.367.420 | 50,00 | 34 | 0,5 | 332.351.613 | | 43,47 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten berikutnya*) :

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

# BAB III
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I dan dengan mempertimbangkan adanya situasi luar biasa adanya pandemi Covid 19 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran TA 2021 dengan rincian seperti pada tabel perubahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2021

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LANGKAT

Nama OPD : BPKAD KAB. LANGKAT

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Jenis Kegiatan/ Sub Kegiatan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | abc | 1/2/3 |
| | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) = 12 - 11 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | **372.255.410.386** | **372.698.405.555** | **442.995.269** | | | | | **372.901.473.628** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **100** | **100** | **372.255.410.386** | **372.698.405.555** | **442.995.269** | | | | | **372.901.473.628** | **KEUANGAN** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | **13.530.414.860** | **13.709.123.839** | **178.708.979** | | | | **100%** | **14.298.037.558** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **7.709.835.661** | **7.302.159.310** | **(407.676.351)** | | | | **100%** | **8.335.759.821** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 6.469.068.000 | 6.102.529.789 | (366.538.211) | DAU | DAU | 12 Bulan | 6.874.411.800 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, dan materai atas terbitnya Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Bendahara serta Pengurus Barang SKPD se-Kab. Langkat TA. 2022 | Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, dan materai atas terbitnya Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Bendahara serta Pengurus Barang SKPD se-Kab. Langkat TA. 2022 | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 12 Bulan | 12 Bulan | 549.679.625 | 431.743.625 | (117.936.000) | DAU | DAU | 12 Bulan | 597.801.225 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Tim Counter Part Pemkab. Langkat , buku laporan keuangan lima tahunan | Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Tim Counter Part Pemkab. Langkat , buku laporan keuangan lima tahunan | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 100% | 100% | 571.088.016 | 565.848.016 | (5.240.000) | DAU | DAU | 54 OPD | 571.088.016 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Bulanan Seluruh SKPD | Tersedianya Laporan Bulanan Seluruh SKPD | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 12 Bulan | 12 Bulan | 120.000.000 | 202.037.869 | 82.037.869 | DAU | DAU | 54 OPD | 297.498.750 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | |
| **5** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **2.077.321.849** | **2.215.213.587** | **137.891.738** | | | | **100%** | **1.925.476.849** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai BPKAD Kab. Langkat, Tersedianya pakaian hari-hari tertentu guna keseragaman | Tersedianya pakaian dinas pegawai BPKAD Kab. Langkat, Tersedianya pakaian hari-hari tertentu guna keseragaman | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 93 Set | 93 Set | 126.780.000 | 126.780.000 | - | DAU | DAU | 90 set | 150.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bimtek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah | Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bimtek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 675.065.000 | 498.000.000 | (177.065.000) | DAU | DAU | 35 Orang | 450.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | 02 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 233.294.212 | 936.162.958 | 702.868.646 | DAU | DAU | 54 OPD | 233.294.212 | Sosialisasi Produksi Perundang-Undangan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.092.182.537 | 654.270.629 | (437.911.908) | DAU | DAU | 54 OPD | 1.092.182.537 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **1.608.999.352** | **1.693.449.352** | **84.450.000** | | | | **100%** | **1.650.864.288** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan peralatan elektronika serta listrik BPKAD | Tersedianya kebutuhan peralatan elektronika serta listrik BPKAD | Bangunan Kantor | Bangunan Kantor | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.421.335 | 9.421.335 | - | DAU | DAU | 8 Jenis | 10.363.469 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 130.524.516 | 130.524.516 | - | DAU | DAU | 32 Jenis | 143.576.968 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor BPKAD | Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor BPKAD | Peralatan rumah tangga | Peralatan rumah tangga | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 44.064.398 | 44.064.398 | - | DAU | DAU | 26 Jenis | 48.470.838 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | pegawai dan tamu | pegawai dan tamu | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 36.300.000 | 36.300.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 36.300.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor BPKAD | Terlaksananya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor BPKAD | Bahan cetakan dan fotocopy | Bahan cetakan dan fotocopy | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 112.119.500 | 112.119.500 | - | DAU | DAU | 20 Jenis | 123.331.450 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya pembelian surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan | Terlaksananya pembelian surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 122.579.603 | 206.969.603 | 84.450.000 | DAU | DAU | 12 Bulan | 134.771.563 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan koordinasi, konsultasi dan studi banding | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan koordinasi, konsultasi dan studi banding | Pegawai | Pegawai | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.154.050.000 | 1.154.050.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 1.154.050.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | **247.404.448** | **477.608.040** | **230.203.592** | | | | **100%** | **431.851.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas | Kendaraan dinas | BPKAD | BPKAD | 1 Unit | 1 Unit | 31.851.000 | 63.702.000 | 31.851.000 | DAU | DAU | 1 Unit | 31.851.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | 10 set | 100.000.000 | Pengadaan Mebel | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Jenis Kegiatan/ Sub Kegiatan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) = (12 - 11) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksanaya pengadaan peralatan gedung kantor | Terlaksanaya pengadaan peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor | BPKAD | BPKAD | 5 Kegiatan | 14 Unit | 115.553.448 | 188.375.528 | 72.822.080 | DAU | DAU | 15 unit | 150.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksanaya pengadaan perlengkapan kantor | Terlaksanaya pengadaan perlengkapan kantor | Sarana dan prasarana gedung kantor | Sarana dan prasarana gedung kantor | BPKAD | BPKAD | 5 Kegiatan | 12 Unit, 1 paket, 70m | 100.000.000 | 225.538.512 | 125.538.512 | DAU | DAU | 1 unit | 100.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | **799.087.600** | **799.087.600** | **-** | | | **12 Bulan** | **799.087.600** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksanaya pembayaran iuran listrik, air, telepon dan internet | Terlaksanaya pembayaran iuran listrik, air, telepon dan internet | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | BPKAD | BPKAD | 12 Bulan | 12 Bulan | 305.940.000 | 305.940.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 305.940.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksanaya pembayaran pegawai honorer/tidak tetap | Terlaksanaya pembayaran pegawai honorer/tidak tetap | Pegawai honorer | Pegawai honorer | BPKAD | BPKAD | 13 Bulan | 13 Bulan | 493.147.600 | 493.147.600 | - | DAU | DAU | 481 OB | 493.147.600 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | **1.087.765.950** | **1.221.605.950** | **133.840.000** | | | **100%** | **1.154.998.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksanaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, Terlaksanaya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional | Terlaksanaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, Terlaksanaya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas | Kendaraan dinas | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 476.783.600 | 610.120.600 | 133.840.000 | DAU | DAU | 23 Unit | 510.608.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksanaya pemeliharaan peralatan kantor BPKAD | Terlaksanaya pemeliharaan peralatan kantor BPKAD | Peralatan kantor | Peralatan kantor | BPKAD | BPKAD | 100% | 100% | 61.485.950 | 61.485.950 | - | DAU | DAU | 65 Unit | 74.398.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksanaya jaminan asset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab. Langkat, Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor BPKAD | Terlaksanaya jaminan asset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab. Langkat, Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor BPKAD | Gedung kantor | Gedung kantor | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 500.000.000 | 950.000.000 | - | DAU | DAU | 1 unit | 550.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| **5** | **02** | **02** | | | **Program Pengelolaan Keuangan** | | | | | | | | | **357.867.276.344** | **358.086.792.634** | **219.516.290** | | | **100%** | **357.745.716.888** | **Program Pengelolaan Keuangan** | |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | | **4.233.556.814** | **4.233.556.814** | **-** | | | | **4.233.556.814** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD TA. 2022 Kab. Langkat | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD TA. 2022 Kab. Langkat | KUA dan PPAS | KUA dan PPAS | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 270.681.874 | 270.681.874 | - | DAU | DAU | 300 buku | 270.681.874 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Tersusunnya KUA dan PPAS P.APBD TA. 2021 Kab. Langkat | Tersusunnya KUA dan PPAS P.APBD TA. 2021 Kab. Langkat | KUA dan PPAS Perubahan | KUA dan PPAS Perubahan | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 238.945.713 | 238.945.713 | - | DAU | DAU | 300 buku | 238.945.713 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD | Terlaksanaya verifikasi RKA SKPD Kab. Langkat | Terlaksanaya verifikasi RKA SKPD Kab. Langkat | RKA | RKA | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 185.813.496 | 185.813.496 | - | DAU | DAU | 54 Dokumen | 185.813.496 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Terlaksanaya verifikasi Perubahan RKA Kab. Langkat | Terlaksanaya verifikasi Perubahan RKA Kab. Langkat | RKA Perubahan | RKA Perubahan | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 630.533.828 | 630.530.828 | - | DAU | DAU | 350 Dokumen | 630.530.828 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Terlaksanaya verifikasi DPA SKPD Kab. Langkat | Terlaksanaya verifikasi DPA SKPD Kab. Langkat | DPA | DPA | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 277.725.497 | 277.725.497 | - | DAU | DAU | 54 Dokumen | 277.725.497 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Terlaksanaya verifikasi Perubahan DPA Kab. Langkat | Terlaksanaya verifikasi Perubahan DPA Kab. Langkat | DPA Perubahan | DPA Perubahan | BPKAD | BPKAD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 635.785.589 | 635.785.589 | | DAU | DAU | 350 Dokumen | 635.785.589 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Tersusunnya Perda APBD Kab. Langkat dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat TA. 2022 | Tersusunnya Perda APBD Kab. Langkat dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat TA. 2022 | Perda APBD dan Perbu Penjabaran APBD | Perda APBD dan Perbu Penjabaran APBD | BPKAD | BPKAD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.433.461.346 | 1.433.461.346 | - | DAU | DAU | 350 Buku | 1.433.461.346 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersusunnya Perda P.APBD Kab. Langkat, tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD Kab. Langkat | Tersusunnya Perda P.APBD Kab. Langkat, tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD Kab. Langkat | Perda P.APBD dan Perbu Penjabaran P.APBD | Perda P.APBD dan Perbu Penjabaran P.APBD | BPKAD | BPKAD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 560.612.471 | 560.612.471 | - | DAU | DAU | 350 Buku | 560.612.471 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | |
| **5** | **02** | **02** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | | **1.416.465.047** | **1.628.741.337** | **212.276.290** | | | **100%** | **1.294.905.591** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Terlaksanaya laporan rekonsiliasi kas daerah | Terlaksanaya laporan rekonsiliasi kas daerah | | | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 97.070.370 | 97.070.370 | | DAU | DAU | 12 Buku | 97.270.370 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusun, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Terlaksanaya penerbitan dan pendistribusian SPD | Terlaksanaya penerbitan dan pendistribusian SPD | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 49.398.889 | 49.398.889 | | DAU | DAU | 34 OPD | 49.398.889 | Penyusun, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis | Dana perimbangan dan dana transfer | Dana perimbangan dan dana transfer | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 249.736.809 | 249.736.809 | - | DAU | DAU | 10 Laporan | 223.577.351 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta dan tersedianya laporan berita acara rekonsiliasi pajak dengan KPP dan KPPN | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta dan tersedianya laporan berita acara rekonsiliasi pajak dengan KPP dan KPPN | | | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 257.001.108 | 267.801.108 | 10.800.000 | DAU | DAU | 3 Dokumen | 177.201.108 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Jenis Kegiatan/ Sub Kegiatan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | lokasi | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) = 12 - 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD | Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 239.939.456 | 239.939.456 | - | DAU | DAU | 34 OPD | 235.139.456 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya FGD bendahara Pengeluaran se kab langkat dan DAK Fisik, Dana desa dan dana kelurahan | Terselenggaranya FGD bendahara Pengeluaran se kab langkat dan DAK Fisik, Dana desa dan dana kelurahan | SKPD, kelurahan | SKPD, kelurahan | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 523.318.415 | 724.794.705 | 201.476.290 | DAU | DAU | 2 Kegiatan | 523.318.415 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| **5** | **02** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | **891.111.702** | **898.351.702** | **7.240.000** | | | **100%** | **891.111.702** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Perda dan Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Perda dan Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD | BPKAD | 100% | 100% | 597.497.821 | 579.697.821 | (17.800.000) | DAU | DAU | 608 Buku | 597.497.821 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah | Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah | Kerugian daerah | Kerugian daerah | BPKAD | BPKAD | 100% | 100% | 152.298.694 | 177.338.694 | 25.040.000 | DAU | DAU | 1 Dokumen | 152.298.694 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten | Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten | Laporan pertanggungjawaban | Laporan pertanggungjawaban | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 141.315.187 | 141.315.187 | - | DAU | DAU | 200 Buku | 141.315.187 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | |
| **5** | **02** | **02** | **2.04** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | **351.326.142.781** | **351.326.142.781** | - | | | **100%** | **351.326.142.781** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Terlaksanaya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Terlaksanaya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Desa | Desa | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 338.472.209.100 | 338.472.209.100 | - | DAU | DAU | 240 Desa | 338.472.209.100 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Dana yang Disalurkan | Jumlah Dana yang Disalurkan | Dana darurat | Dana darurat | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 8.298.855.746 | 8.298.855.746 | - | DAU | DAU | 1 Kegiatan | 8.298.855.746 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Dana Bagi Hasil yang Disalurkan | Jumlah Dana Bagi Hasil yang Disalurkan | Desa | Desa | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 4.685.077.935 | 4.685.077.935 | - | DAU | DAU | 240 Desa | 4.685.077.935 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | |
| **5** | **02** | **03** | | | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | **857.719.182** | **902.489.182** | **44.770.000** | | | **100%** | **857.719.182** | **Program Pengelolaan Barang** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | **857.719.182** | **902.489.182** | **44.770.000** | | | **100%** | **857.719.182** | **Pengelolaan Barang Milik** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Tersusunnya dokumen standar satuan harga | Tersusunnya dokumen standar satuan harga | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 227.037.014 | 280.547.014 | 47.510.000 | DAU | DAU | 1 Dokumen | 227.037.014 | Penyusunan Standar Harga | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pengamanan asset Pemda dan terlaksananya pembuatan sertifikat tanah milik Pemda, pelelangan dan penghapusan BMD | Terlaksananya pengamanan asset Pemda dan terlaksananya pembuatan sertifikat tanah milik Pemda, pelelangan dan penghapusan BMD | Barang milik daerah | Barang milik daerah | BPKAD | BPKAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 305.449.178 | 257.709.178 | (47.740.000) | DAU | DAU | 200 Sertifikat | 305.449.178 | Pengamanan Barang Milik Daerah | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemutakhiran data asset dan sensus BMD | Terlaksananya pemutakhiran data asset dan sensus BMD | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 1 tahun | 1 tahun | 78.855.570 | 128.855.570 | 50.000.000 | DAU | DAU | 1 Dokumen | 78.855.570 | Penilaian Barang Milik Daerah | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Terlaksananya penyusunan laporan BMD | Terlaksananya penyusunan laporan BMD | SKPD | SKPD | BPKAD | BPKAD | 1 tahun | 1 tahun | 246.377.420 | 246.377.420 | - | DAU | DAU | 34 OPD | 246.377.420 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | |

# BAB V
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Kebutuhan anggaran

   Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaiakan.

2. Kaidah Pelaksanaan

   Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Rencana lanjutan

   Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2021 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2021 ini sebesar Rp 372.698.405.655,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

# BAB V
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Kebutuhan anggaran

   Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaiakan.

2. Kaidah Pelaksanaan

   Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Rencana lanjutan

   Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2021 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2021 ini sebesar Rp 372.698.405.655,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.